



Infrastruktur Jalan Mantap Tidak Penuhi Target

Efisiensi Anggaran, Pemkab Diminta Maksimalkan PAD

KULON PROGO - Pembangunan infrastruktur jalan mantap 2024 di Kulon Progo belum sepenuhnya terealisasi. Terutama untuk target realisasi tahun ini, yang terkendala isu pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat. Padahal, jalan-jalan tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung aksesibilitas dan mobilitas warga.

Anggota Komisi 3 DPRD Kulon Progo Angga Pratama mengungkapkan, target jalan mantap pada 2025 belum tentu tercapai. Hal ini disebabkan pembangunan infrastruktur yang masih bergantung pada alokasi anggaran dari pemerintah pusat. "Terlalu mengandalkan DAK (dana alokasi khusus) dan DAU (dana alokasi umum), saat (anggarannya) dipangkas, kita tidak bisa berbuat banyak," ujar Angga, kemarin (6/3).

Angga menjelaskan, masih banyak jalan di Kulon Progo

yang kondisinya rusak, baik ringan maupun berat, seperti Jalan Cerme-Demangan yang sudah sepuluh tahun tak pernah mendapat perbaikan. Jalan penghubung antarkapanewon tersebut sebenarnya telah direncanakan untuk diperbaiki pada 2025. Namun hal itu terhambat akibat pemangkasan DAK. Ini menunjukkan ketidakmampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kajian kami menunjukkan belum terpenuhinya *mandatory spending* infrastruktur sebesar 40 persen," ujarnya.

Angga menambahkan bahwa *roadmap mandatory spending* infrastruktur tinggal menyisakan dua tahun lagi. Saat ini, Pemkab Kulon Progo baru mengalokasikan 16 persen APBD untuk infrastruktur dari target yang seharusnya 40 persen. Data ini menunjukkan pentingnya pemkab mengalokasikan dana bagi pembangunan infrastruktur.

Politisi PPP ini menyarankan, pemkab harus segera merasionalisasi anggaran.

Terutama mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Tujuannya, agar pembangunan infrastruktur tak bertumpu pada dan transfer dari pusat. "Makanya kajian kami membuka peluang perda KTR (kawasan tanpa rokok) direvisi," ujarnya.

Gencarnya revisi perda KTR telah diungkapkan oleh berbagai anggota DPRD Kulon Progo. Lantaran dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah. Khususnya yang berorientasi dengan pembangunan infrastruktur.

Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan DPUPKP Kulon Progo Wuriandrea Gigih Mukhtama menyampaikan, belum mampu memenuhi target jalan mantap yang ditetapkan di tahun sebelumnya sekitar 80 persen. Namun, baru tercapai 73 persen.

Tak tercapainya target disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Untuk pemeliharaan rutin saja dibutuhkan anggaran sekitar Rp 40 miliar per tahun. Namun, anggaran yang tersedia saat ini hanya sekitar Rp 1 miliar. (gas/wia/zl)



ANOM BAGASKORO/RADAR JOGJA

MLIPIR: Pengguna jalan terpaksa menjauhi lubang jalan. Pemkab Kulon Progo belum dapat merealisasikan pembangunan infrastruktur jalan mantap 2025 karena terkendala pemangkasan anggaran.